

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Azmi Fendri, 2021, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: Raja Wali Press.
- Bewa Ragabino, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Fisip UNPAD.
- Dina Susiani, 2019, *Hukum Administrasi Negara*, Jember: Pustaka Abadi.
- Hardani dkk, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- I Nyoman Gede Remaja, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Singaraja: Universitas Panji Sakti.
- Jaidun, 2023, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Malang: Madza Media.
- Jum Anggriani, 2012, *Hukum Adminstrasi Negara*, Jakarta: Graha Ilmu.
- Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Penerbit Qiara Media.
- Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, 2020, *Pengawasan Pemerintahan*, Jatinangor: CV. Cendekia Press.
- Ridwan HR, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung.
- Tiyas Vika, dkk, 2024, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum (Teori dan Praktek)*, Medan: PT. Media Penerbit Indonesia.
- Yudi Setiawan dan Boedi Djatmiko Hadiatmodjo, 2017, *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Zainal Asikin dan Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Barang Milik Daerah.

Peraturan Daerah No.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Walikota Pariaman Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan.

Peraturan Walikota Pariaman Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan, Perbekalan dan Penerangan Jalan Umum.

C. Skripsi dan Jurnal

- Ahlan Fairuz, 2020, "Analisis Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru Riau Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Jalan HR Soebrantas)," *Skripsi*, Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU, 2020.
- Aulia Citra, dkk, 2020, "Koordinasi Antar SKPD Dalam Menanggulangi Pedagang Kaki Lima Yang Mengganggu Lalu Lintas Di Kota Makassar," *Jurnal JPPM: Journal of Public Policy and Management*, Vol.2, No.1.
- Desita Soviana, 2021, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik Pada Era New Normal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul", *Jurnal Enersia Publikasi*, Vol.5, No.1, 2021.
- Dwi Pratiwi Sari, 2011, "Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Bidang Peralatan Khusus Penanggulangan Keamanan Berkadar Tinggi Studi Kasus: MAKO KOPRS BRIMOB POLRI Kelapa Dua Depok 2011", *Skripsi*, Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2012.
- Emilia Malinda, 2019, "Peranan Dinas Perhubungan dalam Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Samarinda", *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, Vol.7, No.7, 2019.
- Hasoan Nadeak, 2009, "Implementasi Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah." *Jurnal Binaprja*, Vol.1, No.3, 2009.
- Layla Tunnur, dkk., 2022, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penerangan Jalan Umum Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan (Studi Kasus Di Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, Vol.5, No.5, 2022.
- Mizan Al Akmal Faizi, 2023, "Evaluasi Penerangan Tempat Parkir Terbuka (*Outdoor*) pada Wisata Candi, *Jurnal Aviation Electronics, Information Technology, Telecommunications, Electrical, Control (AVITEC)*, Vol.5, No.1, 2022.
- Nurul Aulia, dkk, 2025, "Pengawasan pada Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang, *Jurnal Majelis Hukum Indonesia*, Vol.2, No.1, 2025.
- Phonco Viandi dan Ikrima Alfi, 2018, "Analisis Efisiensi Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kabupaten Indramayu", *Tugas Praktik*, Yogyakarta: Fakultas Teknik Universitas Teknologi Yogyakarta, 2018.

Ray Ferzadan, 2020, “Inovasi Kebijakan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Sidoarjo: Isu dan Tantangan” Jurnal Matra Pembaharuan: Jurnal Inovasi Kebijakan, Vol.4, No.5, 2022.

Rozi Yuwandi dan Aldi Mubarak, 2019, “Pelaksanaan Monitoring Penerangan Jalan Umum Oleh UPTD Operasional PJU Di Kota Padang”, Journal Ranah Research: *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol.1, No.3, 2019.

Zhilvia Assura, 2020, “Pengawasan Terhadap Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan Pada Kawasan Pejalan Kaki di Sepanjang Pantai Purus Kota Padang,” Padang: Skripsi Universitas Andalas, 2020.

